

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan DPRD melalui rapat kerja komisi dengan pemerintah, dilaksanakan oleh Komisi-Komisi DPRD dengan cara menyelenggarakan rapat kerja dengan pemerintah, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membahas perencanaan penggunaan APBD agar sesuai dengan peruntukannya. Temuan penelitian menunjukkan tidak adanya penggunaan APBD yang tidak sesuai perencanaan anggaran. Dengan kata lain, penggunaan APBD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Pengawasan DPRD melalui kegiatan kunjungan kerja, dilaksanakan oleh DPRD dengan cara peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang dibiayai oleh APBD untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

3. Pengawasan DPRD melalui pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan APBD, dilaksanakan dengan cara menerima, menampung dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan APBD serta melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan adanya laporan dari masyarakat kepada DPRD untuk meninjau pelaksanaan pembangunan dan hasil peninjauan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
4. Pengawasan DPRD melalui penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, dilaksanakan DPRD dengan cara menilai dan mengevaluasi laporan Kepala Daerah terkait dengan penggunaan APBD serta menentukan sikap untuk menerima atau menolak laporan tersebut secara objektif sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DPRD menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tentang penggunaan APBD Tahun 2010.

## **B. Saran**

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rapat Kerja Komisi DPRD hendaknya semakin dioptimalkan dengan cara membentuk Tim Khusus guna melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan APBD, terutama oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi sebagai pelaksana kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.

2. DPRD Provinsi Lampung disarankan untuk semakin intensif melaksanakan peninjauan secara langsung sebagai bagian dari rangkaian pengawasan kunjungan kerja pada berbagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik atau program pembangunan infrastruktur fisik, sehingga dengan adanya kunjungan secara insidental tersebut maka akan segera ditemukan ada atau tidaknya penyimpangan dalam penggunaan APBD.
3. DPRD Provinsi Lampung disarankan untuk secara proaktif dalam menerima, menampung dan menindaklanjuti temuan atau laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan APBD oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan proyek yang dibiayai oleh APBD, hal ini sebagai antisipasi atas kemungkinan terjadinya kerugian negara akibat penyalahgunaan APBD.
4. DPRD Provinsi Lampung disarankan untuk semakin ketat dan objektif dalam memberikan penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tentang penggunaan APBD, sehingga sekecil apapun potensi penyalahgunaan anggaran akan dapat diantisipasi secara optimal.